



PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kol H. Nazom Nurhawi Belakang Terminal Randik Depan SMK N 3 Sekayu
Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu Telp. (0714) 3330033
Website : <http://www.kesbangpol.mubakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 029 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- d. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati

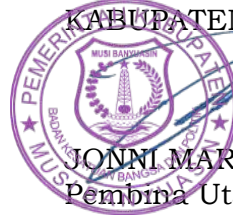
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
13. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, sebagaimana pada diktum KESATU, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Bilamana ada ketentuan tambahan atau kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 14 April 2025

KEPALA BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



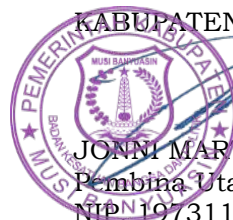
JONNI MARTOHONAN, AP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731109 199311 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : 029 TAHUN 2025
 TANGGAL : 14 APRIL 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
 RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggungjawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Perencana Ahli Muda Sub Koord. Sub-Substansi Program dan Anggaran	Sekretaris
4	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koord. Sub-Substansi Keuangan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kepala Bidang Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa	Anggota
7	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Anggota
8	Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
9	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koord. Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koord. Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen	Anggota
12	Analisis Partai Politik Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik	Anggota
13	Analisis Wawasan Kebangsaan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
14	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran	Anggota
15	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Anggaran	Anggota

KEPALA BADAN KESBANGPOL
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



JONNI MARTOHONAN, AP., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19731109 199311 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 029 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 APRIL 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN
2025.

**RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025**

1. PENANGGUNG JAWAB

- Bertanggungjawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin 2025;
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. KETUA

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025;
- Mengoreksi hasil pekerjaan tim penyusun sesuai tugas yang telah ditetapkan;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;

3. ANGGOTA

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tahun berjalan dan lalu berdasarkan Dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kol H. Nazom Nurhawi Depan SMK N 3 Model Sekayu

Fax / Telp. 0714 – 3330033

Website : <http://www.kesbangpol.mubakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 034 /KPTS-KESBANGPOL/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Panyusunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020, sehingga dipandang perlu menetapkan rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotap(LNRI Tahun 1956 Nomor 55), Undang – undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentkan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LNRI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan LNRI Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2020);

15. Peraturan Bupati

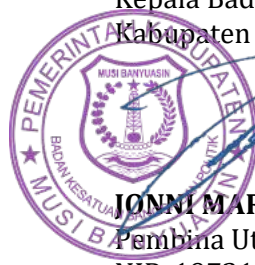
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025.**
- KESATU :** Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran program Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.
- KEDUA :** Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan kurun waktu satu tahunan yaitu tahun 2025.
- KETIGA :** Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT :** Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KELIMA :** Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Dokren Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 yang dituangkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEENAM :** Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengevaluasi capaian pelaksanaan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 12 Juni 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin,



JONNI MARTOHONAN, AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19731109 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025.

Rencana kerja perubahan ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target maupun realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangan baik dari substansi maupun format penulisan, oleh karena itu Kritik dan Saran yang Konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENJA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 26 Juni 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin,



JONNI MARTOHONAN, AP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19731109 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan ke-II	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal P-RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat	31
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	32
3.2 Rencana Program dan Kegiatan	33
3.3 Pendanaan Indikatif	47
BAB IV PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan(Renja-P) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah Perubahan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Dokumen Perencanaan (Dokren) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Dokren Perangkat Daerah dan RPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis RPJMN dan Dokumen Perencanaan (Dokren) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2041;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017- 2025;
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor B-050/137/SETDA/BAPEDA/2023 tentang Arah Kebijakan Pembangunan dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah untuk melakukan penyesuaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja perubahan tahun 2025.
- b. **Tujuan** dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal P-RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Rencana Program dan Kegiatan
- 3.3 Pendanaan Indikatif

BAB. IV. PENUTUP

Memuat catatan paling penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Triwulan ke-II

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2025 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Dengan menggunakan format Tabel 2.1 Realisasi Program dan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 48,86 %, adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Kesbangpol Tahun 2025 sampai dengan triwulan II, yaitu masih adanya perencanaan anggaran yang masih harus diperbaiki atau perubahan sehingga menyebabkan program dan kegiatan belum telaksana sesuai target.

Tabel 2.1

REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN JUNI 2025

Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Fisik (%)	Keuangan (%)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15,729,775,180.00	7,686,125,956.00	50.56	48.86
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,869,396,197.00	3,405,764,634.00	48.77	49.58
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,672,000.00	18,841,800.00	50	37.18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,568,000.00	14,287,800.00	50	35.22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,104,000.00	4,554,000.00	50	45.07
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,011,469,653.00	2,664,265,248.00	50	53.16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,011,469,653.00	2,664,265,248.00	50	53.16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,902,500.00	0	75	0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36,902,500.00	0	75	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,355,000.00	57,230,000.00	71.3	71.22
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34,230,000.00	34,230,000.00	100	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46,125,000.00	23,000,000.00	50	49.86
Administrasi Umum Perangkat Daerah	675,161,524.00	309,805,195.00	52.44	45.89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,980,300.00	9,342,200.00	40	25.26
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132,455,000.00	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	24,161,600.00	70	48.32

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	163,140,624.00	112,706,125.00	70.12	69.09
1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,570.00	24,566,071.00	35	32.75
2. PEMBAYARAN GAGAL BAYAR T.A. 2024 : BELANJA ATK	88,140,054.00	88,140,054.00	100	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62,935,000.00	26,665,000.00	71.18	42.37
1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,270,000.00	0	50	0
2. Pembayaran Gagal Bayar TA.2024 : Belanja Cetak dan Penggandaan	26,665,000.00	26,665,000.00	100	100
Penyediaan Bahan/Material	40,000,000.00	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	22,194,600.00	6,137,400.00	50	27.65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167,456,000.00	130,792,870.00	80	78.11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,402,000.00	15,600,000.00	19.16	19.16
Pengadaan Mebel	81,402,000.00	15,600,000.00	19.16	19.16
1. Pengadaan Mebel	65,802,000.00	0	0	0
2. Pembayaran gagal bayar TA.2024 : Belanja Mebel Backdrop Partisi	15,600,000.00	15,600,000.00	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469,676,200.00	220,725,015.00	50	47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,876,200.00	46,125,015.00	50	34.98
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337,800,000.00	174,600,000.00	50	51.69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463,757,320.00	119,297,376.00	28.01	25.72
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	294,165,000.00	100,103,056.00	35	34.03
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	154,952,320.00	19,194,320.00	17.37	12.39
1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142,258,000.00	6,500,000.00	10	4.57

2. Pembayaran Gagal Bayar TA.2024 : Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor	12,694,320.00	12,694,320.00	100	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,640,000.00	0	0	0
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,742,217,170.00	221,215,457.00	25.72	12.7
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,742,217,170.00	221,215,457.00	25.72	12.7
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,630,010,270.00	208,400,030.00	25	12.79
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	98,731,900.00	7,218,938.00	35	7.31
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13,475,000.00	5,596,489.00	45	41.53
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6,491,082,783.00	3,886,330,190.00	60.48	59.87
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	6,491,082,783.00	3,886,330,190.00	60.48	59.87

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6,049,760,783.00	3,513,750,000.00	58.68	58.08
1. Belanja Hibah Kepada KPU (PSU)	588,320,783.00	0	0	0
2. Hibah Kepada Parpol	5,461,440,000.00	3,513,750,000.00	65	64.34
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	88,222,000.00	87,776,132.00	100	99.49
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	102,755,000.00	86,760,417.00	85	84.43
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250,345,000.00	198,043,641.00	80	79.11
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71,504,000.00	11,697,912.00	35	16.36
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71,504,000.00	11,697,912.00	35	16.36
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	71,504,000.00	11,697,912.00	35	16.36

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	212,219,890.00	28,250,701.00	15	13.31
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	212,219,890.00	28,250,701.00	15	13.31
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	212,219,890.00	28,250,701.00	15	13.31
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	343,355,140.00	132,867,062.00	49.89	38.7
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	343,355,140.00	132,867,062.00	49.89	38.7
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	37,859,840.00	0	75	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	65,312,000.00	32,336,600.00	50	49.51
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95,686,000.00	77,462,040.00	85	80.95
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	144,497,300.00	23,068,422.00	20	15.96

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang tertuang dalam Dokren Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023-2026 yaitu “Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin”.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa untuk masing-masing indikator kinerja, realisasi pencapaian kinerja pada tahun 2025 sampai dengan triwulan empat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota angka capaian menunjukan 49,58 % ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan angka capaian menunjukan 12,70 % ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik angka capaian menunjukan 59,87 % ;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan angka capaian menunjukan 16,36 % ;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya angka capaian menunjukan 13,31 % ;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial angka capaian menunjukan 38,70 %.

Keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2 (2023)	n-1 (2024)	n (2025)	n+1 (2026)	n-2 (2023)	n-1 (2024)	n (2025)	n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	90%	80%	70%	60%	75%	69%	N/A	N/A	Untuk capain n-1 (2024) sebesar 69% setelah pelaksanaan kinerja.

Catatan:

Matrik ini digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja pelayanan SKPD

Berdasarkan Dokren Kesbangpol Tahun 2023-2026 Indikator Kinerja Utama Kesbangpol sebanyak 1 (satu) indikator.

Tabel. 2.2.1
Proyeksi Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target SPM/ standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2 (2023)	n-1 (2024)	n (2025)	n+1 (2026)	n-2 (2023)	n-1 (2024)	n (2025)	n+1 (2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	90%	80%	70%	60%	75%	69%	70%	60%	Realisasi capaian n-1 Tahun 2024 69% dari target 80% yang berarti (Semakinmenurun realisasi capain semakin bagus/baik)
2.	Persentase Pemenuhan Dokumen Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan	-	100%	100%	100%	100%	100%	98%	93%	100%	100%	

Catatan:

Untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dengan Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017-2022

Secara umum, kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 semakin baik dan kondusif, berdasarkan laporan dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, bahwa pada tahun 2023 terdata sebanyak 12 potensi konflik tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan capaian indikator setiap tahunnya. Adapun untuk realisasi capaian indikator kinerja yang muncul dan telah ditangani dengan baik sehingga tidak menjadi konflik ditengah masyarakat. Dari data ini dapat dilihat terjadi penurunan potensi konflik SARA dari data awal sebanyak 16 potensi konflik menjadi 12 potensi konflik atau turun diangka 75% dari target yang ditetapkan sebesar 90% atau dengan capaian sebesar 120%.

Sedangkan realisasi capaian indikator kinerja utama untuk tahun 2024, Persentase penurunan potensi konflik SARA turun diangka 69% dari target 80% atau capaian sebesar 116%.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Isu – isu Strategis Internal
 - a. Keterbatasan dana yang berakibat kegiatan Kesbangpol tidak Optimal;
 - b. Kuantitas dan kualitas SDM yang masih belum mencukupi serta masih perlu peningkatan dan pengembangan;
 - c. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

2. Isu – isu Strategis Eksternal

Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2023-2026, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
- b. Masih munculnya konflik, radikalisme dan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah ditengah masyarakat;
- c. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
- d. Kerawanan menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Masih banyak generasi muda yang terdampak oleh penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;

- f. Belum optimalnya peran Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Daerah;
3. Meningkatkan Ketahanan Politik Dalam Negeri;
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan strategi dan sasaran tersebut maka diambil Kebijakan sebagai berikut :

- 1.. Pembumian Nilai Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- 2.. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
- 3.. Pembangunan Karakter Bangsa;
- 4.. Pembinaan Kewaspadaan Dini;
- 5.. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik;
- 6.. Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- 7.. Fasilitasi Lembaga Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 8.. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Stabilitas Daerah;
- 9.. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama;
- 10...Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah;
- 11...Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Beberapa aspek yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain :
 - a) Adanya Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai landasan yang kuat dimana dengan adanya Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, serta didukung juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang memberikan rambu-rambu dan koridor yang harus dilalui untuk sampai kepada tahap perwujudan visi dan misi yang telah diamanatkan;

- b) Tersedianya sumber daya manusia secara kuantitas yang memadai, bahwa didalam menjalankan roda pemerintahan tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, dan berkemampuan profesional didalam menjalankan tugasnya;
- c) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan suatu modal yang sangat mendukung bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- d) Adanya dukungan dana untuk membantu kegiatan yang berasal dari APBD.

2. Kelemahan (Weakness)

- a) Secara keseluruhan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memenuhi standar dan secara kuantitas jumlah PNS yang ada masih belum mencukupi dan perlunya peningkatan kualitas untuk mendukung kegiatan;
- b) Kualitas pelayanan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara umum masih belum memenuhi rasa kepuasan publik sehingga dengan demikian masih menjadikan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- c) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas bagi tiap bidang;
- d) Masih kurangnya pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Tingkat kesejahteraan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih kurang sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kegiatannya dalam melaksanakan tugas;
- f) Infrastruktur berupa sarana dan prasarana masih kurang mendukung dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

- a) Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b) Adanya dukungan dan kerjasama dari organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya baik itu bersifat kegiatan, masukan, kritikan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- c) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat partisipasi swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan;
- d) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan berpolitik masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Ancaman (Threat)

- a) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin masih belum pulih sepenuhnya sehingga perlu membangun rasa kepercayaan tersebut;
- b) Konflik perbatasan, sengketa lahan dengan pihak investor yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c) Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat;
- d) Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;
- e) Meningkatnya demo-demo anarkis serta ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Selengkapnya revidi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal P-RKPD Tahun 2025
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100%	8.772.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100%	8.772.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	70.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	70.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	40.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	30.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	100%	5.300.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	100%	5.300.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln	5.300.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln	5.300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah	100%	40.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah	100%	40.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dok	40.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dok	40.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	186.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	186.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	126.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	126.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	60.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	915.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	915.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	14 Paket	150.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	30.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	165.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	58 Paket	165.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	25.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	25.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14 Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	400.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	400.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	100%	1.060.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	100%	1.060.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Perorangan	Kesbangpol	Jumlah Paket Roda Dua yang Disediakan	4 Unit	160.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Perorangan	Kesbangpol	Jumlah Paket Roda Dua yang Disediakan	4 Unit	160.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	2 Unit	800.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Paket Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan	2 Unit	800.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kesbangpol	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kesbangpol	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	665.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	665.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	510.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	12 Laporan	510.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	536.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	536.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	320.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	320.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	16.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	16.000.000	
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%	2.220.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%	2.220.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	2.220.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	2.220.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Org	2.100.000.000	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Org	2.100.00.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba -	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	334 Orang	300.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba -	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	334 Orang	300.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	20.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	100 %	6.435.510.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	100 %	6.435.510.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	125.729.559.253	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%	81.928.552.580	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5.085.510.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5.085.510.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	975 Orang	500.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	975 Orang	500.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Orang	250.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	80 Orang	250.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	365 Laporan	600.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	365 Laporan	600.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100%	150.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100%	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	150.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	150.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	150.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	300,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	300.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	300,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	300.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	300,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	300.000.000	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100%	855,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100%	855.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	855,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	855.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang	200 Orang	175,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,	200 Orang	175.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	130,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	130.000.00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	150,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD (2025)					Hasil Analisis Kebutuhan (2025)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400.000.000	
JUMLAH					18.935.510.0000	JUMLAH					19.719.732.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mempunyai usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tujuan dan sasaran Dokumen Perencanaan 2023 - 2026 yaitu **“Terpeliharanya Kesatuan Bangsa, Stabilitas Politik dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin”**. Tujuan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/137/SETDA/BAPPEDA/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dimana salah satu tujuan pembangunan 2023-2026 adalah **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**.

Pembangunan dan roda pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kondisifitas dan stabilitas daerah yang baik, aman dan tentram jauh dari pertikaian atau konflik, huru-hara atau masuknya paham-paham radikal maupun aliran keagamaan yang menyesatkan. Sehingga Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu **“Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin”**. Untuk itu tujuan dan sasaran penting untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan, sasaran, indikator, formula dan target Tahun 2025 tertuang pada table di bawah ini :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
Terpeliharanya kesatuan bangsa, stabilitas Politik dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	$\frac{\text{Jumlah potensi konflik tahun berjalan}}{\text{Target potensi konflik}} \times 100\%$	70%
Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Baik (Good Governance).	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja PD dan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan	$\frac{\text{Realisasi tahun berjalan}}{\text{Target tahun berjalan}} \times 100\%$	100%

3.2 Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu serta untuk mencapai visi dan misi Bupati Musi Banyuasin, adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2025 mempunyai 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) subkegiatan. Adapun Kelompok sasaran untuk menunjang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda;
2. Kalangan pelajar, guru dan pendidik;
3. Unsur - unsur aparatur Pemerintah baik vertikal, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa;
4. Pimpinan, kepengurusan dan simpatisan parpol di tingkat kabupaten dan kecamatan;
5. Pengurus organisasi kemasyarakatan Ormas, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi kepemudaan.

Lokasi kegiatan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dan di kecamatan-kecamatan ataupun desa-desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Sumber dana yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 berdasarkan hasil input pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat diakses melalui alamat : (sipd-ri.kemendagri.go.id). Adapun hasil akhir dari Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/Program/Ke- giatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Lokasi	Sumbe r Dana	PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp.)						Nas ion al	Dae rah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025 (INDUK)	Pergeseran APBD 2025	P-RKPD 2025						
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			18,883,625,819.00	17,670,022,828.00	15,729,775,180.00	16,723,424,344.00							19,080,849,460.00
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			18,883,625,819.00	17,670,022,828.00	15,729,775,180.00	16,723,424,344.00							19,080,849,460.00
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100%	100%	7,262,479,922.00	7,048,876,931.00	6,869,396,197.00	8,221,766,144.00					100%	9,202,470,400.00
8	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	100%	126,412,700.00	126,412,700.00	50,672,000.00	50,672,000.00					100%	89,261,000.00
8	01	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	70,000,000.00	70,000,000.00	40,568,000.00	40,568,000.00	Kab. Musi Banyuas in, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			4 Dokumen	22,740,000.00

8	01	01	2	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	10,104,000.00	10,104,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			4 Laporan	21,265,000.00
8	01	01	2	009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	1 Data	0	36,412,700.00	36,412,700.00	-	-	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			1 Data	45,256,000.00
8	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	100%	100%	5,020,850,422.00	4,848,069,653.00	5,011,469,653.00	6,374,430,000.00					100%	7,182,324,800.00
8	01	01	2	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	51 Orang	5,020,850,422.00	4,848,069,653.00	5,011,469,653.00	6,374,430,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)			58 Orang	7,182,324,800.00
8	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	36,902,500.00	36,902,500.00	36,902,500.00	36,902,500.00					100%	36,902,500.00
8	01	01	2	002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	36,902,500.00	36,902,500.00	36,902,500.00	36,902,500.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			6 Dokumen	36,902,500.00
8	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi	100%	100%	126,480,000.00	126,480,000.00	80,355,000.00	80,355,000.00					100%	173,586,000.00

						Kepegawaian PD												
8	01	01	2	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	34,230,000.00	34,230,000.00	34,230,000.00	34,230,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			1 Paket	52,812,000.00
8	01	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5 Orang	92,250,000.00	92,250,000.00	46,125,000.00	46,125,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			8 Orang	120,774,000.00
8	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	917,558,100.00	917,558,100.00	675,161,524.00	675,161,524.00					100%	881,741,200.00
8	01	01	2	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	27,638,100.00	27,638,100.00	36,980,300.00	36,980,300.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			22 Paket	30,000,000.00
8	01	01	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	197,490,800.00	197,490,800.00	132,455,000.00	132,455,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			7 Paket	198,949,200.00
8	01	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	42 Paket	42 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			42 Paket	28,000,000.00

8	01	01	2	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	59 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00	163,140,624.00	163,140,624.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			59 Paket	157,000,000.00
8	01	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket	9 Paket	73,000,000.00	73,000,000.00	62,935,000.00	62,935,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			9 Paket	68,000,000.00
8	01	01	2	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			1 Paket	40,000,000.00
8	01	01	2	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	8 Laporan	44,389,200.00	44,389,200.00	22,194,600.00	22,194,600.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			16 Laporan	43,582,000.00
8	01	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50 Laporan	335,040,000.00	335,040,000.00	167,456,000.00	167,456,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			50 Laporan	316,210,000.00
8	01	01	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	100%	100%	108,692,000.00	108,692,000.00	81,402,000.00	81,402,000.00					100%	98,459,000.00

8	01	01	2	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua yang tersedia	0	0	-	-	-	-	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			6 Unit	150,935,400.00
8	01	01	2	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	108,692,000.00	108,692,000.00	81,402,000.00	81,402,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			4 Paket	98,459,000.00
8	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	100%	521,776,200.00	480,953,978.00	469,676,200.00	459,085,800.00					100%	259,485,900.00
8	01	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	131,876,200.00	131,876,200.00	131,876,200.00	131,876,200.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			12 Laporan	132,977,900.00
8	01	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	389,900,000.00	349,077,778.00	337,800,000.00	327,209,600.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH)			12 Laporan	126,508,000.00
8	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	403,808,000.00	403,808,000.00	463,757,320.00	463,757,320.00					100%	480,710,000.00

8	01	01	2	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	246,910,000.00	246,910,000.00	294,165,000.00	294,165,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			8 Unit	246,910,000.00
8	01	01	2	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	142,258,000.00	142,258,000.00	154,952,320.00	154,952,320.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Dana Bagi Hasil (DBH); Pajak Daerah			2 Unit	218,550,000.00
8	01	01	2	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00	14,640,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Serasan Jaya	Pajak Daerah			25 Unit	15,250,000.00
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%	100%	2,049,958,635.00	2,049,958,635.00	1,742,217,170.00	1,742,217,170.00					100%	2,154,639,600.00
8	01	02	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	100%	2,049,958,635.00	2,049,958,635.00	1,742,217,170.00	1,742,217,170.00					100%	2,154,639,600.00

8	01	02	2	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	75 Orang	75 Orang	1,815,870,270.00	1,815,870,270.00	1,630,010,270.00	1,630,010,270.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			255 Orang	1.939.980.600.00
8	01	02	2	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	334 Orang	200 Orang	209,887,365.00	209,887,365.00	98,731,900.00	98,731,900.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			70 Orang	193,296,000.00
8	01	02	2	005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	4 Laporan	24,201,000.00	24,201,000.00	13,475,000.00	13,475,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			1 Laporan	21,363,000.00
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	100%	100%	8,321,187,372.00	7,321,187,372.00	6,491,082,783.00	6,002,762,000.00					100%	5,937,128,000.00

8	01	03	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	8,321,187,372.00	7,321,187,372.00	6,491,082,783.00	6,002,762,000.00					100%	5,937,128,000.00
8	01	03	2	0 0 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7,521,458,372.00	6,521,458,372.00	6,049,760,783.00	5,561,440,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu,	Dana Bagi Hasil			1 Dokumen	5,461,440,000.00

8.000	01	03	2.001	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 Orang	180 Orang	150,139,000.00	150,139,000.00	88,222,000.00	88,222,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			195 Orang	101,070,000.00
8.000	01	03	2.004	003	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50 Orang	151,340,000.00	151,340,000.00	102,755,000.00	102,755,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			50 Orang	133,662,000.00
8.000	01	03	2.005	003	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	365 Laporan	365 Laporan	498,250,000.00	498,250,000.00	250,345,000.00	250,345,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			365 Laporan	240,956,000.00

					Daerah	Pemantauan Situasi Politik di Daerah												
8.00	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100%	100%	150,062,000.00	150,062,000.00	71,504,000.00	71,504,000.00					100%	243,322,000.00
8.00	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	150,062,000.00	150,062,000.00	71,504,000.00	71,504,000.00					100%	243,322,000.00
8.00	01	04	2.0013		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang	150,062,000.00	150,062,000.00	71,504,000.00	71,504,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			100 Orang	243,322,000.00
8.00	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	399,937,890.00	399,937,890.00	212,219,890.00	341,819,890.00					100%	756,018,510.00
8.00	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	399,937,890.00	399,937,890.00	212,219,890.00	341,819,890.00					100%	756,018,510.00

8. 0 0	01	05	2. 0 0 1	0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	125 Orang	399,937,890.00	399,937,890.00	212,219,890.00	341,819,890.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			180 Orang	756,018,510.00
8. 0 0	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100%	100%	700,000,000.00	700,000,000.00	343,355,140.00	343,355,140.00					100%	787,270,950.00
8. 0 0	01	06	2. 0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	700,000,000.00	700,000,000.00	343,355,140.00	343,355,140.00					100%	787,270,950.00

8. 0 0	01	06	2. 0 1	0 0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	120 Orang	84,250,000.00	84,250,000.00	37,859,840.00	37,859,840.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		160 Orang	59,493,780.00
8. 0 0	01	06	2. 0 1	0 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	50 Orang	130,750,000.00	130,750,000.00	65,312,000.00	65,312,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		50 Orang	228,666,000.00
8. 0 0	01	06	2. 0 1	0 0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	185,000,000.00	185,000,000.00	95,686,000.00	95,686,000.00	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)		3 Laporan	232,224,000.00

8. 0 0	01	06	2. 0 1	0 0 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00	144,497,300.00	144,497,300.00	Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kelurahan/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)			2 Dokumen	266,887,170.00
--------------	----	----	--------------	-------------	---	--	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---	-----------------------	--	--	--------------	----------------

3.2. Pendanaan Indikatif

Tabel 3.2.

PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

No.	Uraian	ANGGARAN TAHUN 2025	
		Sebelum (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1	2	3	4
I	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	17,670,022,828.00	16,439,235,163.00
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,048,876,931.00	7,897,576,963.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126,412,700.00	50,672,000.00
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000.00	40,568,000.00
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000.00	10,104,000.00
1.3	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	36,412,700.00	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,848,069,653.00	6,090,240,819.00
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,848,069,653.00	6,090,240,819.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36,902,500.00	36,902,500.00
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36,902,500.00	36,902,500.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126,480,000.00	80,355,000.00
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34,230,000.00	34,230,000.00
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	92,250,000.00	46,125,000.00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	917,558,100.00	635,161,524.00
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,638,100.00	36,980,300.00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197,490,800.00	

			132,455,000.00
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	50,000,000.00
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150,000,000.00	163,140,624.00
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73,000,000.00	62,935,000.00
5.6	Penyediaan Bahan/Material	40,000,000.00	-
5.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	44,389,200.00	22,194,600.00
5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335,040,000.00	167,456,000.00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108,692,000.00	81,402,000.00
6.1	Pengadaan Mebel	108,692,000.00	81,402,000.00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480,953,978.00	459,085,800.00
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131,876,200.00	131,876,200.00
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349,077,778.00	327,209,600.00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403,808,000.00	463,757,320.00
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246,910,000.00	294,165,000.00
8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142,258,000.00	154,952,320.00
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14,640,000.00	14,640,000.00
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2,049,958,635.00	1,742,217,170.00
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2,049,958,635.00	1,742,217,170.00
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,815,870,270.00	1,630,010,270.00

1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	209,887,365.00	98,731,900.00
1.3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	24,201,000.00	13,475,000.00
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	7,321,187,372.00	6,002,762,000.00
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	7,321,187,372.00	6,002,762,000.00
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6,521,458,372.00	5,561,440,000.00
1.2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	150,139,000.00	88,222,000.00
1.3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	151,340,000.00	102,755,000.00
1.4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya	498,250,000.00	250,345,000.00

	Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	150,062,000.00	71,504,000.00
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	150,062,000.00	71,504,000.00
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150,062,000.00	71,504,000.00
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	399,937,890.00	381,819,890.00
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	399,937,890.00	381,819,890.00
1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	399,937,890.00	381,819,890.00
F	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	700,000,000.00	343,355,140.00
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	700,000,000.00	343,355,140.00
1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	84,250,000.00	37,859,840.00
1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,	130,750,000.00	65,312,000.00

	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	185,000,000.00	95,686,000.00
1.4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	300,000,000.00	144,497,300.00
	Total Keseluruhan	17,670,022,828.00	16,439,235,163.00

BAB IV

PENUTUP

a. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.

Rancangan awal Dokumen Perencanaan (DOKREN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan (DOKREN) 2023-2026, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sub Bagian dan Seksi;

- 2) Dalam rangka implementasi Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa, tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor. Perlu membangun dan mengintegrasikan berbagai pemikiran yang melibatkan Jajaran Forpimda maupun Forpimcam;
- 3) Peran aktif Forum-forum dan Tim yang dinaungi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus dibina secara selaras dan terpadu;
- 4) Perlunya berbagai inovasi dan kreasi yang terus dibangun yang sinergis baik tingkat regional maupun nasional;
- 5) Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 masih belum sempurna, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepenuhnya dipahami.

c. Rencana Tindak lanjut.

Guna mendukung Program dan Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025, maka perlu melibatkan berbagai Jajaran lintas sektor, seperti Forkopimda, Pengurus Parpol, Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, Tim Terpadu Penanganan Konflik, Aparatur Pemerintah, Ormas/LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Oleh karena itu guna menyelaskan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023–2026, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peran aktif Jajaran Forum Pimpinan Daerah maupun Forum-forum yang berbasis Wawasan Kebangsaan, Aparatur Pemerintah, Pengurus Partai, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, nyaman dan terkendali;
- b. Optimalisasi program dan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara terintegrasi baik tingkat nasional maupun provinsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas

kelembagaan dan SDM Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan berkelanjutan.

Sekayu, 26 Juni 2025

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin,



JONNI MARTOHONAN, AP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19731109 199311 1 001

